

KIPRAH POLITIK PARTAI SOSIALIS INDONESIA

Gili Argenti, S.IP, M.Si

Abstrak

Politik aliran yang terfragmentasi kedalam lima ideologi besar pada masa Orde Lama : Islam, nasionalisme radikal, tradisionalisme jawa, sosialisme demokrat dan komunisme. Menjadi bukti heterogenitas aliran politik yang pernah hidup di Indonesia. Tulisan ini mengangkat kiprah salah satu partai politik yang mewakili salah satu aliran ideologi politik ketika itu, yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai partai yang mewakili ideologi sosialisme demokrat (sosdem), partai politik yang didirikan Sutan Sjahrir ini telah banyak mewarnai panggung politik nasional baik pada awal kemerdekaan sampai masa Orde Lama. Partai Sosialis Indonesia dikenal sebagai model partai berbasis kader yang memiliki konstituen kalangan intelektual perkotaan. Studi partai sosialis Indonesia dalam tulisan ini menarasikan sejarah kelahirannya, sistem kaderisasi, sistem ideologi, program politiknya serta kiprah kadernya pasca pembubaraan oleh Presiden Soekarno.

Pendahuluan

Dalam bukunya Herbert Feith,¹ memetakan beberapa aliran pemikiran yang sangat berpengaruh pada masa revolusi kemerdekaan sampai masa demokrasi terpimpin, Feith membagi peta pemikiran politik yang kemudian menjadi ideologi saat itu pada lima arus besar ; Islam modernis, sosialisme demokratis, nasionalisme radikal, tradisionalisme jawa dan komunis.

Kelima aliran ideologi tersebut termanifestasi dalam beberapa partai politik ; ideologi Islam modernis diwakili partai Masyumi, sosialisme demokrat diwakili oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI), nasionalisme radikal diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI), Islam tradisional diwakili Partai Nahdatul Ulama (NU) dan komunisme diwakili Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada masa pasca kemerdekaan tahun 1945-1959 Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer (demokrasi liberal), sistem tersebut memiliki beberapa ciri². *Pertama*, munculnya politik aliran sebuah konsekuensi logis ketika diterapkan sistem parlementer dengan sistem multi partai, akan membuat masyarakat Indonesia *terfragmentasi* kebeberapa aliran politik, saat itu seperti yang telah penulis sebutkan diatas, di Indonesia terdapat lima aliran politik yang dominan.

Masing-masing aliran tersebut memiliki konstituen yang sangat ideologis, terkadang konflik yang terjadi dilingkaran elit berdampak pada kader-kader ditingkat bawah, sehingga konflik horizontal kerap terjadi atas nama fanatisme

¹ Herbert Feith dan Lance Castles (editor), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta : LP3ES, 1988)

² Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)

golongan. Bahkan bisa menjadi konflik *sentrifugal*, yaitu konflik yang cenderung meluas melewati batas wilayah, akibatnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik. *Kedua*, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan, perwujudan kekuasaan parlemen diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet sering mengalami jatuh bangun. *Ketiga*, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi, hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. *Keempat*, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal, dalam periode ini Indonesia menganut sistem banyak partai, ada hampir 40 partai politik yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya.³

Dari latar belakang kondisi sosial politik seperti yang telah penulis uraikan, Partai Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan Sutan Sjahrir lahir, tumbuh dan berkembang pada masa-masa itu, sebuah masa yang menurut Afan Gaffar era yang paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia sebelum era reformasi, dimana perbedaan ideologi politik bukan menjadi suatu penghalang. Kebebasan berpendapat (*freedom of expression*) menemukan momentumnya, setiap warga masyarakat dapat dengan leluasa menggunakan hak-hak politiknya dengan bebas tanpa diliputi perasaan khawatir menghadapi konsekuensi dari yang mereka suarakan.

Kiprah PSI dipentas politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sosok Sutan Sjahrir, keduanya menjadi *icon* yang tidak dapat dipisahkan, Sjahrir sudah menjadi ideolog bagi kendaraan politik yang didirikan pada 12 Februari 1948 ini. Menurut J.D. Legge, sisi yang menarik dari kiprah PSI ialah bahwa partai bergambar bintang ini memosisikan dirinya sebagai partai intelektual atau kaum terdidik, sehingga kesan sebagai kelompok *elitis* dalam stratifikasi sosial masyarakat Indonesia sulit dibantah,⁴ kesan elitisnya ini dikemudian hari menjadikan PSI hanya menjadi sebuah partai terasing yang tidak mampu membangun kontak dengan arus bawah. Kegagalan PSI dalam menjangkau dukungan massif arus bawah dapat terlihat dari perolehan suara pada pemilu tahun 1955, PSI hanya mampu mengantongi suara 753.191 dengan meraih sebanyak 5 kursi di parlemen.⁵

Mengalami penurunan sangat drastis dibandingkan jumlah kursi sebelum pemilu dilaksanakan, yaitu sebanyak 15 kursi menjadi nomor ketiga terbanyak setelah PNI dan Masyumi. Penentuan jumlah kursi di parlemen sebelum pemilu

³ Ibid Hal 13.

⁴ J.D Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan : Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993) Hal 9.

⁵ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. (Jakarta : KPG, 1999) Hal 85.

1955 berdasarkan perkiraan kasar terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada.⁶ Dari adanya penurunan kursi di parlemen, menjadikan PSI sebagai partai *gurem*, tetapi meski hanya menjadi partai *minoritas*, kemampuan kader-kader mereka dalam mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dapat dikatakan berhasil. Pembubaran mereka bersama Masyumi di tahun 1960-an oleh pemerintah Orde Lama, tidak lantas memberangus kiprah politik para kader-kadernya, banyak para anggotanya tetap menjadi pengkritik dan membangun jaringan perlawanan bawah tanah terhadap Soekarno,⁷ kemunculan gerakan mahasiswa angkatan 1966 tidak bisa dilepaskan dari kader-kader Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) *underbow* PSI yang menggerakkan mahasiswa untuk turun kejalan, salah satu tokoh mahasiswa yang berafiliasi dengan Gemsos adalah Soe Hok Gie yang menjadi salah satu penggerak aksi demonstrasi tersebut, bahkan Soe Hok Gie berdasarkan hasil disertasi doctoral John Maxwell disebut-sebut menjadi tokoh kunci aliansi antara militer dengan mahasiswa ketika menghancurkan Orde Lama.⁸

Pada konsolidasi awal Orde Baru, PSI serta Masyumi tidak mendapat izin untuk *direhabilitasi* namanya, akhirnya kedua partai politik ini menempuh strategi baru, Masyumi mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang konsen bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan dengan mengkader anak-anak muda Islam, beberapa puluh tahun kemudian pengkaderan berpola pendidikan (*tarbiyah*) ini melahirkan Partai Keadilan (PK) yang kemudian namanya berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).⁹

Sedangkan PSI merubah strategi dengan melakukan *infiltrasi* pada lembaga-lembaga pemerintahan, tokoh-tokoh penting PSI menduduki beberapa pos kementerian Orde Baru seperti misalnya Prof. DR. Soemitro Djojohadikoesoemo, dilembaga parlemen tokoh mahasiswa yang berafiliasi dengan PSI tidak mau kalah, Rahman Toleng terjun menjadi politisi senayan, bahkan sosok Rahman Toleng merintis surat kabar sebagai media yang mendukung kebijakan Orde Baru.¹⁰ Bulan madu antara eks-PSI dan Soeharto tidak berlangsung lama, kebijakan Orde Baru yang tidak *populis* menuai banyak kekecewaan dari generasi baru Gemsos, kebangkitan gerakan mahasiswa di tahun 1974, 1977/78 tidak bisa dilepaskan dari eksponen eks-PSI yang berhasil melakukan regenerasi perkaderan dengan melahirkan kader-kader muda mahasiswa yang kritis.¹¹

⁶ J.D Legge Ibid Hal 15.

⁷ Daniel Dhakidae, *Soe Hok Gie : Sang Demostran* (Kata Pengantar), Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demonstran*. (Jakarta : LP3ES, 2005) Hal 30.

⁸ John Maxwell, *Soe Hok Gie : Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani*. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti. 2001).

⁹ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS : Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*. (Yogyakarta : LKiS, 2009).

¹⁰ Francois Raillion, *Politik Dan Ideologi Mahasiswa Indonesia : Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. (Jakarta : LP3ES, 1985)

¹¹ Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti : Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1908-1998*. (Jakarta : Rajawali Pres, 1999)

Dari narasi singkat diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema PSI dan kiprah politiknya dalam makalah ini, bagaimana sejarah pendirinya? seperti apa konsep ideologi, strategi, tindakan dan gerakannya? sehingga mampu tetap eksis sampai saat ini, terbukti dengan masih adanya organisasi mahasiswa Gemsos, walaupun secara institusi kepartaian mereka sudah dibubarkan oleh Presiden Soekarno.

Kerangka Teori

Menganalisa PSI sebagai salah satu kekuatan politik yang pernah berpengaruh di Indonesia, penulis menggunakan kerangka teori partai politik, partai kader dan sosialisme demokrat.

Partai politik menurut Ramlan Surbakti¹² mengutip definisi Carl Friedrich mendefinisikan bahwa partai politik ialah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan idil kepada para anggotanya, sementara itu Soltau menjelaskan bahwa partai politik yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik, dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.

Ciri serta definisi partai politik yang diungkapkan dua ilmuwan politik barat tersebut sangat bias, karena cenderung menyingkirkan faktor ideologi sebagai bagian integral dari partai politik. Bagi Ramlan Surbakti partai politik mesti memiliki ideologi, yang berfungsi sebagai identitas pemersatu serta landasan tujuan perjuangan politik, dinegara manapun menurutnya setiap partai politik harus memiliki ideologi, terlepas ideologi itu bersifat doktriner, pragmatis atau jalan tengah diantara keduanya.

Dari uraian diatas kemudian Ramlan Surbakti, merumuskan definisi partai politik yang merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapih dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Definisi partai politik Ramlan Surbakti hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo,¹³ bahwa partai politik ialah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan biasanya secara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya.

Partai kader ialah partai politik yang memiliki jumlah anggota relatif terbatas, para kadernya direkrut secara kooptasi, kekuatan mereka bersumber pada

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : PT. Grasindo, 2010).

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009) Hal 403-404.

kualitas bukan kuantitas anggotanya. Mereka mendisiplinkan kadernya secara ketat dan menerapkan sistem kader yang berjenjang dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas, indoktrinasi ideologi dilakukan secara tertutup.

Ideologi sosialisme adalah ajaran dan gerakan yang percaya bahwa penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi menjadi suatu keharusan, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ideologi sosialis hakikatnya sebuah kepercayaan bahwa segala penderitaan dan kemiskinan yang dihadapi manusia dapat dilenyapkan.¹⁴ Dalam perkembangan selanjutnya ideologi sosialisme memunculkan banyak varian, tetapi dari banyaknya varian ideologi tersebut komunisme dan sosialisme demokrat (sosdem) menjadi dua aliran ideologi sosialis yang banyak dianut banyak negara di dunia.

Pada tahun 1896 Bernstein menulis sederetan karangan dalam majalah *Neue Zeit* dengan judul Masalah Sosialisme, dalam karangan-karangan itu ia mengajak kaum sosialis untuk melepaskan retorika revolusioner, menurutnya perjuangan revolusioner harus diganti dengan gerakan reformasi, kaum sosialis harus memperjuangkan cita-cita politiknya melalui mekanisme demokratis tanpa kekerasan lewat pemilihan umum.¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisme demokrat (sosdem) adalah ideologi yang berasal dari sosialisme, sosdem percaya bahwa perjuangan dengan damai, konstitusional serta demokratis menjadi sesuatu yang realistis, mereka percaya bahwa mekanisme pemilihan umum bisa dimanfaatkan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan kaum miskin, dari pada perjuangan revolusioner kaum komunis yang menekankan perjuangan dengan kekerasan dan bersenjata.

Tinjauan Pustaka

Literatur yang membahas Partai Sosialis Indonesia (PSI) dalam kepustakaan politik Indonesia masih sangat minim jumlahnya, kelangkaan literatur ini disebabkan imbas dari kebijakan politik masa lalu dari pemerintah Orde Baru yang melarang ajaran sosialisme, marxisme, leninisme dan komunisme. Sehingga mengakibatkan akses untuk memperoleh informasi tentang ideologi kiri serta variannya sangat terbatas di Indonesia, walaupun PSI merupakan partai yang berideologi sosialisme demokrat (lebih ke kanan) bahkan sangat anti totaliterisme komunisme Uni Soviet. Simbolisasi ajaran sosialisme yang identik dengan komunisme, membuat para intelektual Indonesia pada masa Orde Baru sangat jarang mengangkat PSI dalam karya ilmiahnya.

Tetapi ditengah kelangkaan literatur tentang PSI, penulis akhirnya berhasil menemukan beberapa karya dari para ilmuwan politik dalam maupun luar negeri yang mengangkat PSI dalam karya intelektualnya.

¹⁴ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2007).

¹⁵ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).

Karya J.D Legge yang berjudul *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan : Peranan Kelompok Sjahrir*, karya ini menjadi salah satu sumbangsih intelektual luar negeri yang berhasil *mencover* peran kaum sosialis demokrat dalam revolusi kemerdekaan, dalam karyanya Legge menjelaskan kemunculan kaum intelektual pengikut Sjahrir yang melakukan gerakan politik bawah tanah melawan fasisme Jepang, walaupun saat itu kelompok sosialis ini belum menjelma menjadi partai politik (PSI), kemunculan mereka sebagai salah satu kekuatan politik pada masa revolusi sangat mempengaruhi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karya Legge juga berhasil menjelaskan kelahiran lapisan kedua generasi sosialis demokrat yang kemudian menjadi pendukung utama PSI. Kelemahan Legge menurut penulis ia tidak bisa menjelaskan peran politik PSI (sebagai sebuah partai politik) pasca revolusi kemerdekaan, ia hanya menjelaskannya sekilas tentang turunnya perolehan suara PSI dalam pemilu 1955, akibat kegagalan elit partai ini membangun komunikasi dengan lapisan bawah rakyat Indonesia.

Karya kedua tentang PSI yang penulis peroleh ialah sebuah artikel karya dari Lindsay Rae yang berjudul *Sutan Sjahrir dan Kegagalan Sosialisme Indonesia*,¹⁶ dalam karyanya ini Rae mendeskripsikan biografi Sutan Sjahrir dan sekilas pandangan ideologi sosdem Partai Sosialis Indonesia, konsep sosdem PSI menurutnya hampir sama dengan sosdem yang berkembang di Eropa Barat, yang menggunakan cara-cara non kekerasan serta menempuh mekanisme demokratis dalam meraih kekuasaannya.

Kelemahan karya Rae ini menurut penulis, tidak mampu menjelaskan secara komprehensif sejarah, visi misi dan PSI.

Karya ketiga dari M. Fadroel Rahman berjudul *PSI dan Perjuangan*,¹⁷ menurut penulis karya Rahman ini relatif komprehensif dari dua karya yang penulis jelaskan diatas, dalam karyanya Rahman berhasil merekonstruksi PSI secara utuh dari sisi sejarah, program perjuangan, platform dan ideologi. Deskripsi Rahman tentang PSI ini mampu menjawab kelangkaan sejarah yang komprehensif tentang PSI, selama ini publik hanya mengenal partai kaum intelegensia ini sebatas partai yang didirikan oleh Sutan Sjahrir, tidak mengetahui gambaran PSI sebagai sebuah partai politik, yang pernah eksis pada masa Orde Lama. Tapi penjelasan Fadroel Rahman tentang PSI sebatas ruanglingkupnya sebagai partai politik, ia tidak menjelaskan kiprah partai ini dalam belantara politik nasional.

Dari paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa karya ilmiah tentang PSI, pada umumnya membahas aspek sejarah dan kiprah politik mereka sebelum dibubarkan oleh Presiden Soekarno, kiprah kader PSI pasca pembubaran tahun 1960-an sangat jarang sekali diangkat oleh para ilmuwan politik, padahal para kader PSI ini tetap berkiprah dalam dunia politik Indonesia dengan mengubah strategi gerakan dari parlementer ke beberapa gerakan sosial seperti terjun sebagai

¹⁶ Lindsay Rae, *Sutan Sjahrir dan Kegagalan Sosialisme Indonesia*. (Jakarta : Edisi Seratus Tahun Sutan Sjahrir.

¹⁷ M. Fadroel Rahman, *PSI dan Perjuangannya*. (Jakarta : Edisi Setaus Tahun Sutan Sjahrir)

akademisi, wartawan, teknokrat dan aktifis mahasiswa. Dalam tulisan ini penulis akan mengangkat tema kiprah kader PSI setelah tahun 1960.

Sejarah Partai Sosialis Indonesia

Pada tanggal 20 November 1945 Sutan Sjahrir mendirikan Partai Rakyat Sosialis (Paras), sedangkan Amir Syarifudin beberapa minggu sebelumnya mendirikan Partai Sosialis Indonesia (Parsi), kedua partai tersebut sedang mencoba mendapatkan kader-kader dikalangan pemuda revolusioner¹⁸, pada saat itu antara Sjahrir dan Syarifudin tidak terdapat perbedaan ideologis secara prinsipil, mereka sama-sama pernah terlibat gerakan bawah tanah ketika melawan fasisme Jepang, walaupun sikap anti Jepang bertolak dari pandangan ideologis yang berbeda. Anti fasis Sjahrir dipengaruhi ideologi sosdem yang bercorak liberalis yang berkembang di Eropa Barat, sedangkan Amir Syarifudin dipengaruhi kebijakan garis kebijakan Dimitrov Uni Soviet, yang menghendaki adanya kerjasama kaum komunis dengan kapitalis barat untuk melawan fasisme.¹⁹

Karena adanya persamaan prinsip diantara keduanya, maka atas desakan berbagai kalangan, Sutan Sjahrir dan Amir Syarifudin kemudian mempersatukan Paras dan Parsi menjadi satu partai yang berideologi sosialis. Lahirlah Partai Sosialis (PS) yang menghimpun kekuatan-kekuatan politik kalangan kiri saat itu. Tetapi bulan madu antara keduanya tidak berlangsung lama, perubahan kebijakan komitmen (Uni Soviet) dengan mencabut doktrin Dimitrov, digantikan dengan doktrin Zhdanov dengan kebijakan memutuskan hubungan dengan negara-negara kapitalis barat, kaum komunis dihimbau untuk mengakhiri kerja sama dengan pihak-pihak yang akomodatif terhadap kapitalisme global, kebijakan baru kaum komunis Internasional tersebut sangat bersebrangan dengan Sutan Sjahrir yang percaya bahwa kemerdekaan nasional bisa dicapai dengan perundingan dan kerja sama dengan negara-negara barat.

Amir Syarifudin seorang komunis fanatik yang selalu tunduk terhadap kebijakan komitmen menarik faksinya dalam tubuh Partai Sosialis dan bergabung dengan Musso dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR), sedangkan Sutan Sjahrir membentuk partai baru pada tanggal 12 Febuari 1948 dengan nama Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Ideologi PSI

Sutan Sjahrir merumuskan ideologi PSI dengan prinsip Sosialisme Demokrat (Sosdem), sebuah paham *revisionisme* atas Marxisme yang berkembang di daratan Eropa Barat, pilihan Sjahrir atas sosdem dipengaruhi oleh lingkungan

¹⁸ Soe Hok Gie, *Orang-Orang Di Persimpangan Kiri Jalan*. (Bandung : Bentang, 2005) Hal 79

¹⁹ Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis*. (Jakarta : Intermedia, 1997).

sosial saat ia tinggal di Belanda, Sjahrir aktif dalam kegiatan-kegiatan para aktifis sosialis demokrat di negeri kincir angin tersebut, tetapi Sjahrir kerap menggunakan terminologi sosialisme kerakyatan sebagai padanan sosdem yang terlalu barat.

Menurut Sjahrir sosialisme kerakyatan adalah sebuah paham yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, menghormati hak-hak kemanusiaan dan berjiwa kemanusiaan, sosialisme kerakyatan sama dengan demokrasi liberal yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan menolak kehidupan feodalisme serta kepemimpinan sentralistik pada satu orang.²⁰ Menurut Sutan Sjahrir ideologi sosialisme yang dianut PSI berbeda dengan ideologi yang dianut oleh PKI, perbedaan yang krusial antara konsep sosialisme PSI dan PKI adalah kaum komunis mengagap diktator proletariat yang mesti dijalankan sebagai jalan menuju sosialisme, sedangkan sosdem berkeyakinan mekanisme pemilu dalam sistem negara demokratis bisa digunakan sebagai jalan menuju kesejahteraan.

Visi dan Misi PSI

Visi dan Misi PSI adalah berjuang untuk demokrasi. Demokrasi harus menjadi bentuk universal dari organisasi negara dan cara hidup karena didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab individunya. Dengan menolak setiap kediktatoran, setiap bentuk pemerintahan totaliter atau otoriter karena mereka melanggar martabat manusia, menghancurkan kebebasan manusia dan aturan hukum. Sosialisme hanya dapat diwujudkan melalui demokrasi dan demokrasi hanya bisa dipenuhi melalui sosialisme.²¹

Ketegasan dalam mendudukkan karakter kerakyatan atau demokrasi dalam mencapai sosialisme sekaligus memperjuangkan hak sipil dan kebebasan politik merupakan basis nilai atas asas-asas yang mendasari gerakan sosialis maupun sosial-demokrasi diseluruh dunia. Sehingga PSI dengan tegas memperjuangkan supaya Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia terwujud di Indonesia.

Program PSI

PSI membangun program politik yang merupakan turunan dari dasar-dasar pandangan sosialisme kerakyatan, PSI mengakui serta memperjuangkan Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia seperti : (1) hak setiap orang untuk mempunyai kehidupan pribadi dengan tiada diganggu oleh negara, (2) persamaan tiap orang warga negara untuk hukum, (3) perwakilan rakyat dengan jalan pemilihan merdeka yang sama dan rahasia, (4) pemerintah yang dilakukan oleh mayoritas akan tetapi dengan menjunjung hak-hak minoritas. (5) pembuatan undang-undang yang dikuasai oleh perwakilan rakyat, (6) pengadilan yang otonom yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah.²²

²⁰ Sutan Sjahrir, *Sosialisme Indonesia Pembangunan : Kumpulan Tulisan Sutan Sjahrir*. (Jakarta : Leppenas, 1982) Hal 80-105.

²¹ M. Fadroel Rahman, *PSI dan Perjuangan*, 14 Februari 2006. Hal 2

²² Ibid Hal 4

Sedangkan dilapangan ekonomi PSI upaya untuk menjamin adanya demokrasi ekonomi, ditegaskan dalam program nasional PSI bidang ekonomi antara lain yang merupakan prinsip adalah: (1) Proses ekonomi diatur oleh negara menurut rencana, (2) Proses ekonomi dipimpin dan diawasi oleh negara, (3) Negara mendorong dan membimbing inisiatif masyarakat untuk memperkuat dasar perekonomian rakyat, (4) Kekuatan rakyat diatur dan diorganisir oleh koperasi. Berkaitan langsung dengan program dibidang ekonomi, PSI menempatkan jaminan atas pekerjaan dan hak sosial lainnya sebagai program nasional bidang perburuhan. Dalam program bidang perburuhan ini jelas terlihat bahwa jaminan atas hak sosial yang menjadi ciri negara kesejahteraan (*welfare state*) juga menjadi ciri khas PSI dengan sosialisme kerakyatannya.²³

Bidang lainnya yang menjadi pokok perjuangan PSI dalam program nasionalnya seperti : pertanian, kepegawaian, pendidikan dan kebudayaan, pemuda, sosial, kesehatan dan makanan rakyat, perumahan dan kota, perumahan rakyat di desa dan internasional. Dibidang pendidikan dan kebudayaan, tekanannya terutama pada mendemokrasikan pengajaran hingga sekolah terbuka untuk anak-anak dari segala lapisan dan kemampuan ekonominya tiada lagi menjadi halangan untuk menuntut ilmu dan keahlian. “program ini jelas menegaskan bahwa negara wajib menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan (ilmu dan ahlinya) tanpa kecuali.

Dibidang sosial, PSI menegaskan perjuangannya untuk kesetaraan gender dengan program, menambah kesempatan untuk pekerjaan bagi kaum wanita, supaya memudahkan baginya mencapai emansipasi yang sebenarnya, dengan dasar persamaan sepenuhnya dilapangan politik, ekonomi, dan sosial antara kaum wanita dan lelaki. Selain itu memperjuangkan adanya jaminan sosial untu yatim piatu, kaum cacat (invalid), orang tua, kesehatan dan pendidikan oleh orang tuanya.²⁴

Dibidang internasional, jelas diupayakan untuk mendukung segala upaya kerjasama internasional, perdamaian, penyelesaian konflik internasional tanpa kekerasan dan membentuk badan-badan internasional untuk menopang upaya memajukan kesejahteraan, perdamaian, keadilan dan solidaritas antar masyarakat dan individu di seluruh dunia.²⁵

Dalam bidang perburuan PSI menetapkan beberapa program nasionalnya yang meliputi ; (1) Mengusahakan dan menghilangkan pengangguran serta eksploitasi dari manusia oleh manusia, (2) Menjamin hak-hak dasar sosial seperti (hak untuk bekerja, menerima upah yang mencukupi kehidupan buruh sekeluarga, mendapat penghasilan yang sama untuk pekerjaan, hak beristirahat, memperoleh perawatan kesehatan atau cuti hamil, jaminan hidup untuk warga negara yang

²³ Ibid Hal 5

²⁴ Ibid Hal 7

²⁵ Ibid Hal 8

tidak mampu bekerja dan memperoleh bantuan supaya tidak merosot kehidupannya), (3) mengusahakan perwujudan azas kerakyatan dalam perusahaan dan (4) penyempurnaan undang-undang perburuan serta jaminan sosial serta peraturan-peraturannya.²⁶

Sistem Pengkaderan

PSI merupakan partai kader, proses pengkaderan dilakukan sangat ketat dengan sistem sel, sehingga kader satu daerah kerap kali tidak mengenal kader dari daerah lain, sistem pengkaderan dipilih PSI untuk menyiapkan kader agar siap melakukan gerakan bawah tanah. Dalam sistem pengkaderan PSI mendidik para kadernya untuk menghilangkan sikap feodal, egois dan menjadikan para anggotanya lebih merakyat serta mampu memimpin rapat-rapat politik. Dengan sistem pengkaderan yang ketat ini, mengakibatkan anggota PSI disuatu daerah hanya punya 12 anggota.

Analisis Penulis

Melihat PSI dalam perjalanan sejarahnya, menurut penulis menjadi sebuah fenomena yang sangat unik, partai yang berisi gerbong para intelektual ini pernah berhasil menjadi salah satu kekuatan politik yang cukup diperhitungkan pada awal-awal kemerdekaan, setelah itu peran PSI dalam kehidupan politik timbul tenggelam, sampai akhirnya dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960. Tapi sebagai sebuah ideologi, sosialis demokrat yang mereka perjuangkan tetap eksis sampai detik ini, sebagian besar para mantan pengikut PSI dapat kita temukan perannya sebagai teknokrat, kaum oposisi, dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan, sebagian lagi berkecimpung sebagai kaum intelegensia yang pikirannya tetap mencuat dalam seminar-seminar dan halaman-halaman opini surat kabar.

Menurut penulis PSI sudah memiliki bekal yang cukup untuk menjadi sebuah partai besar, selain figur Sutan Sjahrir yang cukup familiar dikalangan para pemuda, partai ini juga berisi para intelektual lapisan elit dalam stratifikasi sosial masyarakat Indonesia, dua modal ini apabila bisa dimanfaatkan dengan baik dan efektif oleh PSI sebenarnya bisa menjadi aset suara dalam pemilu 1955. Tetapi sejarah kemudian berkata lain, PSI menjadi semacam anomali partai kaum terpelajar di tengah tingkat pendidikan rakyatnya yang sangat rendah, ditambah dengan kultur feodal yang masih dominan mempengaruhi relasi sosial masyarakat Indonesia, PSI menjadi partai politik terasing pada zamanya.

Kelompok intelektual PSI di awal kemerdekaan mampu mempengaruhi jalannya pemerintahan, mereka bahkan menduduki posisi-posisi strategis dalam jumlah yang tidak wajar, khususnya jabatan Sekretaris Jendral di Kementriaan Dalam Negeri dan Kementrian Pertahanan, serta – walaupun tidak mencolok – di tingkat-tingkat atas dalam Angkatan Darat. Kendati pengaruh yang dimilikinya

²⁶ Ibid Hal 9

sangat besar, pengaruh PSI tidak berlangsung lama, berbeda dengan lawan-lawan politiknya, partai ini gagal membangun basis dukungan massa pada pemilu 1955.

Hilangnya basis dukungan yang kuat di dalam parlemen (hanya diwakili 5 orang) tidak berarti tamatnya peranan penting partai ini. Dari kedudukan-kedudukan penting lainnya di dalam pemerintahan Indonesia, partai ini masih mempengaruhi beberapa kebijakan dan administrasi negara, walaupun memang tidak begitu dominan perannya, seperti pada masa awal kemerdekaan.

Menurut J.D Legge,²⁷ persepsi diri anggota PSI sebagai wakil kaum intelektual Indonesia menjadi bagian kesalahan strategi dalam membangun basis dukungan massa rakyat pada pemilu 1955, mereka merasa cocok dengan aliran-aliran pemikiran sosial politik modern yang dijumpai di Eropa dan Amerika, serta bagian-bagian Asia, sehingga berusaha membedakan dirinya dengan orang Indonesia pada umumnya, klaim diri sebagai orang berpendidikan barat dan menggunakan pendekatan rasional ketika melihat masalah-masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat, menjadikan retorika politik yang mereka kemukakan tidak populis serta dimengerti oleh rakyat. Sehingga komunikasi politik dua arah seperti yang dilakukan partai-partai lain tidak bisa dilakukan oleh PSI secara maksimal.

Setelah PSI dibubarkan oleh Soekarno karena dinilai terlibat dalam pemberontakan PRI/Pemersta, kader-kader partai ini masih solid membangun jaringan dan komunikasi antara mereka. Eks-PSI ini sering bertukar pikiran tentang perkembangan politik mutakhir, sehingga mengundang minat banyak anak muda untuk turut aktif dalam diskusi-diskusi mereka.

Pada awal konsolidasi rezim orde baru tahun 1966 ada upaya merehabilitasi kembali PSI, tapi akhirnya upaya politik itu tidak terlaksana, sehingga muncul pemikiran di kalangan eks-PSI untuk merintis gerakan baru yang tidak berdasarkan motif ideologis, tapi berlandaskan program yang riil, gerakan ini kemudian dikenal dengan *independent group*. Ide-ide dari kelompok ini tentang wacana penyederhanaan partai politik menjadi dua partai, mempertahankan stabilitas politik sebagai syarat pertumbuhan ekonomi dan usulan menggunakan sistem distrik pada setiap pemilu, merupakan ide-ide progresif yang melampaui zamanya, tetapi kemudian beberapa point usulan tersebut diadopsi oleh Soeharto dalam menyusun kebijakan politik orde baru. Sumbangan ide-ide politik tersebut, menunjukkan pada publik Indonesia, bahwa PSI sebagai sebuah kekuatan politik masih eksis perannya, walaupun secara institusi gerakan yang diinspirasi ideologi sosialisme demokrat ini sudah berakhir kiprah sosial politiknya sejak tahun 1960.

Kiprah politik eks-PSI dimasa Orde Baru dapat ditemukan perannya sebagai teknokrat, nama Sarbini Sumawinata yang masuk sebagai tim ekonomi

²⁷ J. D Legge Ibid Hal 19

bersama Widjojo Nitisastro menjadi bukti bahwa proses kaderisasi pengikut Sutan Sjahrir ini tidak terputus, bahkan Emil Salim dan Widjojo sering dikaitkan sebagai kelompoknya PSI, lantaran pemikiran mereka dengan kelompok pengikut Sutan Sjahrir ini banyak ditemukan kesamaanya, terutama tentang konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Selain memainkan peran integral sebagai bagian sistem politik orde baru, para eks-PSI juga memainkan peran oposanya, pada peristiwa pra dan pasca Malari Januari 1974, banyak para aktifis gemsos –underbow PSI- turut aktif menggalang aksi protes melawan kebijakan orde baru yang pro asing, penangkapan aktifis Yopie Lasut, Dorodjatun Kuntjorojakti dan Syahrir menjadi bukti keterlibatan Gemsos dalam aksi yang berujung huru-hara politik, bahkan ikut ditangkapnya mantan sekjen PSI Soebadio Sastrosatomo menguatkan opini bahwa PSI terlibat aksi demonstrasi tersebut. Pengaruh gerakan sosialis juga turut mewarnai aksi penentangan mahasiswa terhadap pencalonan kembali Soeharto pada tahun 1977-78, aksi yang berujung kebijakan depolitisasi kampus dengan peraturan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan BKK (Badan Kordinasi Kemahasiswaan).²⁸

Kesimpulan

Dari paparan tentang keadaan objektif dan perkembangan PSI, penulis dapat menyimpulkan beberapa point. *Pertama*, PSI merupakan partai yang mengedepankan rasionalitas berpikir, sehingga revolusi berpikir dalam masyarakat menjadi tujuan utama, PSI sangat anti dengan mitologi dan feodalisme yang telah menjerumuskan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang terbelakang. *Kedua*, PSI menganut ideologi sosialisme demokrat (sosdem) yang meletakkan perjuangan mensejahterakan rakyat pada mekanisme demokrasi di parlemen, PSI menolak cara-cara revolusi untuk mewujudkan cita-cita sosialisnya, garis perjuangan ini yang membedakan PSI dengan PKI atau gerakan komunisme.

Ketiga, sistem pengkaderan PSI menggunakan sistem kaderisasi yang sangat ketat (sistem sel), PSI lebih mencari kualitas daripada kuantitas kader, strategi pengkaderan ini kemudian yang menjadi faktor kelemahan dan kekuatan PSI. Menjadi kelemahan karena PSI tidak mampu menjangar massa rakyat yang lebih luas, karena hanya mengejar kualitas bukan kuantitas. Menjadi kekuatan karena dengan pola pengkaderan sistem sel ketat, secara tidak langsung telah menyiapkan infrastruktur bagi gerakan bawah tanah PSI selanjutnya, pasca dibubarkan oleh pemerintah orde lama, terbukti para kader PSI bisa terus berkiper di lapangan sosial politik pada masa orde baru bahkan sampai saat ini. Apalagi disaat era ketebukaan melanda republik ini, pemikir Sutan Sjahrir dan gerakan PSI kembali dikaji oleh publik serta diuji kembali relevansinya dengan konteks kekinian.

Relevansi Teori

²⁸ Edy Budiaryso, *Menentang Tirani : Aksi Mahasiswa 77/78*. (Jakarta : Grasindo, 2000)

Dalam makalah ini penulis menggunakan teori partai politik dari Ramlan Surbakti dan teori ideologi sosialisme demokrat Bernstein, menurut penulis kedua teori tersebut masih relevan digunakan sebagai alat untuk menganalisis fenomena kepartaian di Indonesia. Sedangkan relevansi dengan konteks kekinian menurut penulis, bahwa PSI telah meletakkan fondasi penciptaan suatu partai politik yang modern, dengan meletakkan pendidikan politik sebagai ujung tombak gerakannya, PSI memelopori sistem sosial politik yang anti feodalisme dan oligarkisme yang dibutuhkan dalam sistem kepartaian modern Indonesia saat ini.

PSI juga memelopori pentingnya kaum intelektual masuk dalam struktur partai politik, sehingga ketika sebuah partai politik tersebut menang dan meraih kekuasaan, ia telah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam mengisi pos-pos kekuasaan. Partai pimpinan Sutan Sjahrir juga dikenal sebagai partai yang sangat terbuka serta akomodatif terhadap nilai-nilai barat, bahkan Herbert Feith dalam buku *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, mengutip pidato salah satu tokoh PSI yang menerangkan bahwa masyarakat Indonesia hendaklah mengambil nilai-nilai universal barat yang selaras dengan kemajuan zaman, karena tidak selamanya yang datang dari dunia barat berdampak negatif terhadap budaya bangsa pribumi, menurut penulis dalam konteks saat ini dimana peradaban barat telah menjadi peradaban yang superior, suka tidak suka bangsa-bangsa timur harus belajar dengan barat, tentu belajar yang dilandasi sikap rasional kritis.

Terakhir, PSI telah memberi pelajaran berharga pada masyarakat Indonesia, bahwa tidak selamanya partai politik menjadi satu-satunya kendaraan yang bisa digunakan dalam meraih kekuasaan dalam pemerintahan, kiprah kader-kader PSI di masa orde baru menjadi bukti bahwa dengan ketiadaan institusi kepartaian, mereka masih bisa terus bergerak dinamis dan menyumbangkan saham pemikiran yang tidak sedikit bagi pembangunan politik Indonesia kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyarso, Edy, *Menentang Tirani : Aksi Mahasiswa 77/78*. (Jakarta : Grasindo, 2000).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Culla, Adi Suryadi, *Patah Tumbuh Hilang Berganti : Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1908-1998*. (Jakarta : Rajawali Pres, 1999).
- Dinuth, Alex, *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis*. (Jakarta : Intermasa, 1997).
- Feith , Herbert dan Lance Castles (editor), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta : LP3ES, 1988).
- Feith , Herbert, *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. (Jakarta : KPG, 1999).

- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).
- Maxwell, John, *Soe Hok Gie : Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani*. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2001).
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : PT. Grasindo, 2010).
- Soe Hok Gie : *Sang Demostran* (Kata Pengantar), Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demonstran*. (Jakarta : LP3ES, 2005).
- Syam, Firdaus, *Pemikiran Politik Barat*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2007).
- Suseno, Franz Magnis *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).
- Soe Hok Gie, *Orang-Orang Di Persimpangan Kiri Jalan*. (Bandung : Bentang, 2005).
- Sjahrir, Sutan, *Sosialisme Indonesia Pembangunan : Kumpulan Tulisan Sutan Sjahrir*. (Jakarta : Leppenas, 1982).
- J.D Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan : Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993)
- M. Fadroel Rahman, *PSI dan Perjuangan*, 14 Febuari 2000